

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baru-baru ini, terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Semenanjung Korea. Pada tanggal 27 April 2018, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya di Pamunjom, sebuah kawasan di zona demiliterasi yang menjadi perbatasan kedua negara. Mereka bahkan saling berpelukan satu sama lain. Peristiwa tersebut bermula dari keinginan Korea Selatan untuk mewujudkan reunifikasi.¹ Momen bersejarah bertemunya kedua pemimpin negara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi titik penting dalam proses unifikasi kedua negara tersebut.

Kemudian, pada 12 Juni 2018, Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Singapura untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut membahas kesepakatan denuklirisasi Semenanjung Korea. Selanjutnya, Kim dan Trump bertemu kembali di Hanoi, Vietnam pada 27-28 Februari 2019. Sayangnya, pertemuan tersebut menemui jalan buntu karena tidak ada kesepakatan yang tercipta di antara mereka.²

Terpisahny Semenanjung Korea menjadi dua negara bermula sejak akhir Perang Dunia II. Setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Semenanjung Korea terbebas dari pendudukan Jepang dan dibagi menjadi dua, yaitu bagian

¹ The Strait Time, *South Korea's Moon Jae-in hails Trump-Kim meeting as result of astounding imagination*, <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-koreas-moon-jae-in-hails-trump-kim-meeting-as-result-of-astounding-imagination>, tanggal akses 11 September 2019, 13:34

² CNN, *„Sometimes you have to walk“: Trump leaves Hanoi with no deal*, <https://edition.cnn.com/2019/02/27/politics/donald-trump-kim-jong-un-vietnam-summit/index.html>, tanggal akses 01 Maret 2020, 17:03

utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang berideologi komunis, dan bagian selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat yang berideologi liberalis. Pada tahun 1950, Perang Korea berkecamuk ditandai dengan invasi tentara Korea Utara ke Korea Selatan. Invasi tersebut didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Amerika Serikat dan PBB mengecam invasi tersebut, lalu mengirimkan bantuan berupa pasukan untuk membantu tentara Korea Selatan melakukan serangan balasan hingga ke wilayah utara. Demikian seterusnya, kedua negara saling menyerang satu sama lain, didukung oleh negara-negara besar yang bertentangan dari segi ideologi. Hingga pada tahun 1953, muncul kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata di antara kedua negara. Namun, dapat dikatakan bahwa kedua negara masih dalam keadaan berperang hingga saat ini.³

Meskipun demikian, berbagai upaya untuk menyatukan kembali kedua negara sudah dilakukan dari tahun 1973 hingga saat ini, berikut adalah beberapa upaya reunifikasi antara kedua negara; (1) *Federal Republic of Koryo* yang diinisiasi oleh Korea Utara pada tahun 1973. Republik Federal Koryo diproklamakan untuk merepresentasikan bangsa Korea di PBB. Upaya tersebut dicanangkan oleh pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Il-sung sebagai salah satu upaya unifikasi,⁴ kemudian dilanjutkan dengan (2) *Sunshine Policy*, pada masa pemerintahan Kim Dae-jung, kebijakan tersebut berupa kerjasama pemerintahan antar kedua negara dengan tujuan untuk menjaga perdamaian. Sayangnya, kebijakan tersebut gagal karena Korea Utara mengeluarkan senjata nuklirnya yang pertama setelah menarik diri dari perjanjian nuklir.⁵ (3) *Unification tax*, pada

³ James L. Stokesbury, (1990). *A Short History of the Korean War*. New York: Harper Perennial.

⁴ Chi Young Pak, (2000). *Korea and the United Nations*. Den Haag: Kluwer Law.

⁵ Bruce Cumings, (2005). *Korea's Place in the Sun: a Modern History*. Norton. pp. 502-04.

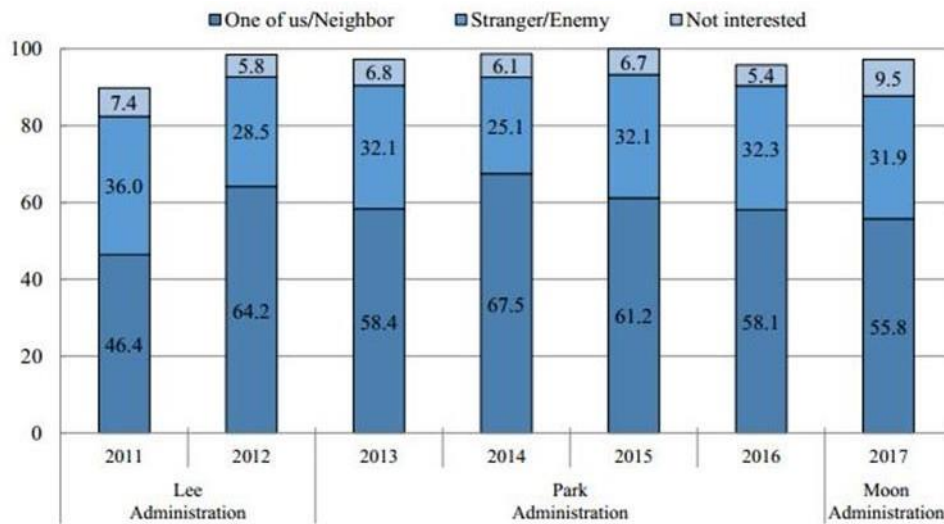
tanggal 1 Januari 2011, Parlemen Korea Selatan mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama -pajak reunifikasil. Menurut Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, sebagian pajak akan digunakan untuk biaya reunifikasi. (4) *Economic Community*, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak juga mencanangkan kebijakan Komunitas Ekonomi Korea pada 2009. Lee memandang bahwa kedua negara di Semenanjung Korea sama-sama memiliki potensi ekonomi, sehingga bila dibentuk kerjasama ekonomi, maka akan mempermudah kebijakan reunifikasi.⁶ Dari keempat upaya yang dilakukan baik oleh Korea Utara maupun Korea Selatan hingga saat ini masih belum maksimal dalam mewujudkan persatuan Semenanjung Korea.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam pidato kenegaraan memperingati hari kemerdekaan Korea Selatan dari penjajahan Jepang menargetkan reunifikasi Korea terlaksana dan Semenanjung Korea menjadi satu negara pada tahun 2045. Moon juga mengumumkan bahwa dua kota di Semenanjung Korea, yaitu Seoul dan Pyongyang akan dijadikan calon tuan rumah bersama Olimpiade 2032. Hal tersebut diumumkan pada saat menghadapi provokasi militer Korea Utara dan ketegangan politik dengan Jepang.⁷ (Financial Times, 2019). Berikut adalah kutipan dari pernyataan Presiden Moon Jae-In, -*I pledge to solidify the foundation so that we can successfully host the joint 2032 Seoul-Pyongyang Olympics and stand tall in the world as one Korea by achieving peace and unification by 2045, which will mark the 100th anniversary of*

⁶ Chosun Ilbo, (2009). *Lee Myung-bak Unveils Inter-Korean Cooperation Plans*.

⁷ Edward White & Leo Lewis, *South Korea's president seeks Korean unification by 2045*, <https://www.ft.com/content/0fd71f12-bf10-11e9-89e2-41e555e96722> tanggal akses 11 September 2019, 13:40

liberation,⁸ Disamping itu masyarakat Korea Selatan juga menunjukkan dukungan terhadap visi Moon Jae-in dalam proses reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hal ini terbukti dari grafik berikut mengenai persepsi Korea Selatan terhadap Korea Utara.



Gambar 1.1 Persepsi Masyarakat Korea Selatan Terhadap Korea Utara

Sumber: Assan anual survey 2011-2017 <http://en.asaninst.org/contents/tag/asan-annual-survey/>

Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Korea Selatan menganggap Korea Utara sebagai bagian dari mereka dan tetangga. Sedangkan 31.9% lainnya masih menganggap Korut sebagai musuh dan ancaman bagi negara mereka. Sisanya lebih memilih untuk tidak peduli sama sekali terhadap isu tersebut.

⁸ Edward White & Leo Lewis

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana upaya Korea Selatan dalam mewujudkan target unifikasi Korsel Korut tahun 2045.

1.2 Rumusan Masalah

Bertemunya Moon Jae-in dan Kim Jong-un untuk pertama kalinya pada tanggal 27 April 2018 di kawasan Pamunjom menimbulkan tanda-tanda bahwa Korea Selatan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan reunifikasi di Semenanjung Korea. Terpisahnya wilayah tersebut berawal sejak akhir Perang Dunia II, yaitu lepasnya wilayah tersebut dari penjajahan Jepang, lalu dikuasai oleh Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Pada tahun 1950, kedua negara berperang, hingga mengumumkan gencatan senjata tiga tahun kemudian, dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, kedua negara telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan reunifikasi, seperti *Federal Republic of Koryo*, *Sunshine Policy*, *Unification Tax* dan *Economic Community*. Dari berbagai upaya tersebut, masih belum maksimal dalam mewujudkan reunifikasi.

Moon Jae-in menargetkan reunifikasi Korea terlaksana dan Semenanjung Korea menjadi satu negara pada tahun 2045. Disamping itu masyarakat Korea Selatan juga menunjukkan dukungan terhadap visi Moon Jae-in dalam proses reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana upaya Korea Selatan dalam mewujudkan target unifikasi Korea pada tahun 2045.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian peneliti adalah “*Bagaimana Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam Mewujudkan Target Unifikasi Korea tahun 2045?*”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan target reunifikasi tahun 2045.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait reunifikasi Korea bagi penstudi HI lainnya.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi institusi internasional maupun pemerintah negara lain dalam hal upaya reunifikasi.

1.6 Studi Pustaka

Dilihat dari faktor sejarah, Korea Utara dan Korea Selatan telah bertikai sejak berkejadiannya Perang Dingin. Pada masa itu, dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi Korea menjadi dua. Uni Soviet menyebarkan ideologi komunis di bagian utara, sedangkan Amerika Serikat menyebarkan ideologi liberal di bagian selatan. Hingga terjadilah perang antara

kedua negara Korea, sampai akhirnya ditandai gencatan senjata pada 1953, namun secara resmi perang belum berakhir sampai saat ini.

Tulisan pertama ditulis oleh Charles K. Armstrong yang berjudul *Inter-Korean Relations in Historical Perspective*. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fase-fase hubungan antara kedua negara Korea. Fase pertama, hubungan *zero-sum game* yang berakhir pada *Joint Communiqué* 1972, yaitu hubungan resmi kedua negara untuk pertama kalinya. Fase kedua, periode *dialog on-off* yang memuncak pada ditandatanganinya *Basic Agreement* (Desember 1991) dan *The Agreement on Denuclearization of the Korean Peninsula* (Februari 1992), serta masuknya kedua Korea secara bersamaan ke PBB pada September 1991. Fase ketiga, ditandai dengan terbukanya Korut terhadap ekonomi eksternal dan kekuatan politik, memuncak pada pertemuan Juni 2000, *Inter-Korean Summit* Presiden Korut Kim Jong-Il dan Presiden Korsel Kim Dae-Jung. Fase keempat, periode dengan intensitas hubungan ekonomi di Semenanjung Korea yang melewati batas dan meliputi dialog antar-Korea, Rusia, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat yang kesemuanya merupakan anggota *Six-Party Talks*. Yang membedakan tulisan tersebut dengan penelitian ini adalah Armstrong hanya menjelaskan fase hubungan, sedangkan penelitian ini fokus pada upaya reunifikasi dari pemerintah Korsel.⁹

Tulisan kedua ditulis oleh Chung-in Moon yang berjudul *Understanding the DJ Doctrine: The Sunshine Policy and the Korean Peninsula*. Tulisan tersebut bertujuan untuk menjelaskan enam prinsip reunifikasi Korea, yaitu kebijakan

⁹ Charles K. Armstrong, "Inter-Korean Relations in Historical Perspective", *International Journal of Korean Unification Studies* Vol. 14 No. 2, 2005

proaktif, *flexible dualism*, kemampuan militer yang meyakinkan, kolaborasi internasional, konsensus dalam negeri dan *pseudo-unification*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Moon menjelaskan prinsip reunifikasi.¹⁰

Tulisan ketiga dikutip dari tulisan Colonel David Coghlan yang berjudul *Prospects from Korean Reunification*. Tulisan tersebut menjelaskan peran negara-negara yang terlibat dalam proses reunifikasi, seperti Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia.¹¹

Tulisan keempat dikutip dari tulisan Martin Hart-Landsberg yang berjudul *The Promise and Perils of Korean Reunification*. Menjelaskan bahwa ada dua opsi untuk melakukan reunifikasi, yaitu menggabungkan Korea Utara ke dalam Korea Selatan secara langsung (sama dengan kasus penyatuan Jerman) atau secara bertahap (berjalan perlahan-lahan sehingga tidak langsung menimbulkan kekacauan di Utara dan menghemat biaya reunifikasi).¹²

Tulisan kelima dikutip dari tulisan S. Cheon yang berjudul *Trust – The Underlying Philosophy of The Park Geun Hye Administration*. Kutipan tersebut menjelaskan konsep *trust politic* yang dijalankan Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Geun Hye dalam mewujudkan reunifikasi. Premis pertama dalam konsep tersebut adalah secara tegas dalam menghadapi segala ancaman dan hambatan yang mengganggu perdamaian berdasarkan prinsip pertahanan yang kuat atau *strong defense principle*. Premis kedua adalah *trust diplomacy* yang

¹⁰ Chung-in Moon, *Understanding the DJ Doctrine: The Sunshine Policy and the Korean Peninsula*, Yonsei University Press, 1999

¹¹ Colonel David Coghlan, *Prospects from Korean Reunification*, U.S. Army War College, 2008

¹² Martin Hart-Landsberg, *The Promise and Perils of Korean Reunification*, Lewis and Clark College Vol. 60, 2009

menggambarkan suatu upaya untuk menciptakan hubungan dan kerja sama antar masyarakat global yang terhubung dengan prinsip kepercayaan. Premis ketiga dalam *trust politic* adalah adanya proses harmonisasi hubungan antarnegara Korea (Seoul dan Pyongyang). Dasar filosofi politik kepercayaan atau *trust politic* diwujudkan dalam proses kepercayaan di Semenanjung Korea (*Korean Peninsula Trust Process*).¹³

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan yang Terkait

Kebijakan Moon Jae-in di Semenanjung Korea adalah kebijakan jangka panjang dan komprehensif yang dipimpin oleh Korea Selatan untuk mewujudkan 'perdamaian' dan 'kemakmuran' di Semenanjung Korea serta Asia Timur Laut bersama dengan Korea Utara, tetangga kawasan, dan masyarakat internasional. Ada tiga kebijakan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Mengutamakan Perdamaian

Perdamaian adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dengan prioritas tertinggi, serta landasan untuk kemakmuran.

b. Semangat 'Saling Menghormati'

Korea Selatan mengejar "kemakmuran bersama Semenanjung Korea", di mana Selatan dan Utara saling menghormati dan bekerja sama, dengan memegang teguh tiga sikap - tidak ada keinginan untuk keruntuhan Korea Utara, tidak ada upaya penyatuan dengan pemaksaan, dan tidak mengejar penyatuan melalui cara buatan.

c. Kebijakan 'Terbuka'

¹³ S. Cheon, "Trust – The Underlying Philosophy of The Park Geun Hye Administration", Washington DC: Center for Strategic and International Studies, 2013

Kebijakan tersebut akan diselesaikan melalui partisipasi dan interaksi publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat sepenuhnya dipahami oleh - dan dibuat oleh – rakyat Korea Selatan.

1.7.2 Tujuan

Ada tiga tujuan yang akan diperoleh dari kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Resolusi Masalah Nuklir Korea Utara dan Pembentukan Perdamaian Permanen

Korea Selatan akan menyelesaikan masalah nuklir secara damai dengan memainkan peran 'mengarahkan' sementara pada saat yang sama bergerak bersama dengan mitra globalnya. Selain itu, juga bermaksud mengganti enam puluh tahun terakhir gencatan senjata yang tidak stabil dengan rezim perdamaian permanen, untuk memastikan perdamaian secara praktis dan institusional.

b. Pengembangan Hubungan Antar-Korea yang Berkelanjutan

Korea Selatan akan mewarisi dan mengembangkan perjanjian antar-Korea yang sudah ada, termasuk Komunike Bersama Selatan-Utara 4 Juli, Perjanjian Dasar Antar-Korea, Deklarasi Bersama Selatan-Utara 15 Juni, dan Deklarasi 4 Oktober, serta akan menyelesaikan perselisihan internal dalam masyarakat Korea Selatan tentang penyatuan dan kebijakan pemerintah soal Korea Utara dan menciptakan konsensus nasional.

c. Realisasi Komunitas Ekonomi Baru di Semenanjung Korea

Korea Selatan akan membangun satu pasar tunggal di Semenanjung Korea untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru dan menciptakan komunitas ekonomi

antar-Korea yang hidup berdampingan dan sejahtera bersama, serta akan membangun tatanan ekonomi baru yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut dengan membangun Tiga Sabuk Ekonomi yang menghubungkan tidak hanya kedua Korea, tetapi juga tetangga dari Semenanjung Korea.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada masa pemerintahan Moon Jae-in, yaitu sejak tahun 2017 hingga 2020. Itu karena Moon Jae-in merupakan presiden Korea Selatan yang menargetkan upaya reunifikasi tercapai paling lambat tahun 2045.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis bersumber dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis mendapatkan jurnal-jurnal tersebut dari media internet dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian. Judul dari jurnal-jurnal yang digunakan misalnya *A Short History of the Korean War* yang ditulis oleh James L. Stokesbury, *The Korean Conflict* oleh Malak Salim Baqi, *Korea and the United Nations* oleh Chi Young Pak, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik. Penulis juga menggunakan beberapa artikel berita dan dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Korea Selatan, karena membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara tersebut dalam mewujudkan upaya reunifikasi. Sedangkan unit eksplanasinya adalah dinamika hubungan Korea Utara-Korea Selatan dalam konflik di Semenanjung Korea. Untuk tingkat analisis, tentu saja negara. Karena penelitian ini menekankan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara.

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tipe analisis yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Dalam hal ini, penulis menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti Korea Selatan dalam mencapai kepentingannya, yaitu reunifikasi, serta mengamati kejadian-kejadian yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penulis juga menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan, apa dampak dan hasilnya bagi negara tersebut. Penulis juga menggunakan kerangka berpikir kebijakan Korea Selatan yang bersumber dari situs resmi Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yaitu resolusi masalah nuklir, pengembangan hubungan berkelanjutan, serta peningkatan kerja sama ekonomi antarnegara. Penjelasan tiga poin kebijakan tersebut didukung sumber-sumber yang penulis ambil dari internet seperti berita-berita yang terkait dengan topik penelitian, lalu penulis menganalisisnya berdasarkan kerangka tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini merupakan Bab Pengantar yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH KONFLIK DI SEMENANJUNG KOREA

BAB ini akan menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya konflik di Semenanjung Korea serta pecahnya wilayah tersebut menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

BAB III UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MEWUJUDKAN REUNIFIKASI

BAB ini akan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dalam mewujudkan reunifikasi Semenanjung Korea, terlebih dengan adanya Kementerian Unifikasi.

BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENARGETKAN TERCAPAINYA REUNIFIKASI PADA 2045

BAB ini akan menganalisis upaya Moon Jae-in dalam menargetkan reunifikasi tercapai pada 2045. Penulis juga menjelaskan apa dasar kebijakan tersebut dengan menggunakan kerangka konseptual yang ada.

BAB V KESIMPULAN

BAB ini akan disimpulkan berbagai temuan dari analisis yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan menyuguhkan hasil terpenting dari penelitian, kesimpulan dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.